

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 15 Mei 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman 4)	Rabu, 15 Mei 2019	Lampung-Palembang Enam Jam Via Tol	Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) Pematang panggung-Kayuagung akan bersifat fungsional selama arus mudik Lebaran 2019. Ruas tol tersebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Lampung menuju Palembang hanya dalam enam jam. Padahal sebelumnya, Lampung menuju Palembang harus ditempuh dengan waktu 10 hingga 12 jam.
2	Republika (Halaman 14)	Rabu, 15 Mei 2019	Harga Tanah di Lokasi Calon Ibukota Diawasi	Pergerakan harga tanah di wilayah yang menjadi pilihan ibukota baru ikut menjadi pengawasan antara kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berupaya agar hal terkait tanah tidak menjadi persoalan.
3	Kompas (Halaman 1)	Rabu, 15 Mei 2019	Berita Foto	Kendaraan yang didominasi truk parker di tempat peristirahatan darurat di Jalan Tol Bakauheni-Bandar Lampung Kilometer 33, Kalianda, Lampung Selatan, Senin malam. Warung tenda yang menjual makanan dan minuman banyak didirikan warga di area ini. Di tempat ini sudah tersedia fasilitas toilet, tempat shalat, dan pengisian bahan bakar portable yang beroperasi pukul 07.00-19.00.
4	Kompas (Halaman 16)	Rabu, 15 Mei 2019	Jalan Alternatif Diperbaiki	Perbaikan jalan yang akan digunakan untuk jalur alternatif arus mudik lebaran terus dikebut. Sementara itu, kepolisian juga menyiapkan skenario pengaturan dan pengamanan arus mudik.
5	Kompas (Halaman 20)	Rabu, 15 Mei 2019	Bogor Tata Pulo Geulis Tanpa Menggusur	Walikota Bogor Bima Arya memastikan penataan kawasan Pulo Geulis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan juga tidak menggusur rumah warga.
6	Media Indonesia (Halaman 5)	Rabu, 15 Mei 2019	Pemindahan Ibukota Butuh Momen yang Tepat	Presiden Jokowi memindahkan ibukota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara. Ketua Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan pemindahan ibukota akan mempertegas bahwa Jokowi ialah pemimpin visioner. Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh ke depan sekaligus mampu merealisasikan.
7	Media Indonesia (Halaman 21)	Rabu, 15 Mei 2019	Perbaikan Jalan Pantura Dikebut	Perbaikan meliputi penambahan jalan berlubang, pengaspalan ulang, pengecatan media jalan hingga pemotongan rumput dan ilalang. Selain tol, ruas jalan di jalur pantai utara (pantura), Kabupaten Cirebon, juga tengah dibenahi. Perbaikan dikebut hingga pada H-10 Lebaran.
8	Bisnis Indonesia (Halaman 8)	Rabu, 15 Mei 2019	Rencana Pindah Ibukota: Pusat Perlu Terapkan Konsep Urban Forest	The Natural Conservancy menilai jika pemerintah serius ingin memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan, maka perlu ada konsep pembangunan hijau. Pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup dari The Nature Conservancy (TNC) Kalimantan Timur, Niel Makinuddin menyatakan, pihaknya belum mendengar rancangan ibukota baru dari pemerintah pusat.
9	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Rabu, 15 Mei 2019	Harga Baru Rumah Subsidi: Penetapan Tunggu Persetujuan Menkeu	Rencana pemerintah meningkatkan batas harga rumah bersubsidi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan meskipun sebelumnya harga baru rumah bersubsidi ditargetkan berlaku mulai bulan lalu.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Rabu, 15 Mei 2019	Pengembang Minta Sejumlah Insentif	Pengembang properti akan mendukung pembangunan calon ibukota baru Indonesia apabila

				diberikan beragam insentif, seperti kemudahan dalam perizinan serta kepastian terkait dengan permintaan pasar.
11	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Rabu, 15 Mei 2019	Berita Foto	Pengendara sepeda motor melintasi jalur Trans—Sulawesi poros Palu—Toboli di kawasan Pegunungan Kebun Kopi, Sulawesi Tengah, Selasa (14/5). Jalur penghubung Kota Palu dengan sejumlah kabupaten serta Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara tersebut merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui para pemudik saat Lebaran 2019.

Judul	Lampung-Palembang Enam Jam Via Tol	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 4)		
Resume	Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) Pematang Panggang-Kayuagung akan bersifat fungsional selama arus mudik Lebaran 2019. Ruas tol tersebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Lampung menuju Palembang hanya dalam enam jam. Padahal sebelumnya, Lampung menuju Palembang harus ditempuh dengan waktu 10 hingga 12 jam.		

Lampung-Palembang Enam Jam Via Tol

● MURSALIN YASLAND

BANDAR LAMPUNG – Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) Pematang Panggang-Kayuagung (Sumatra Selatan) dan Kayuagung-Inderalaya akan bersifat fungsional selama arus mudik Lebaran 2019. Ruas tol tersebut mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Lampung menuju Palembang hanya dalam enam jam. Padahal sebelumnya, Lampung menuju Palembang harus ditempuh dengan waktu 10 hingga 12 jam.

Tim Kantor Staf Presiden dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah melakukan pemantauan langsung dengan menyusuri JTTS dari Bakauheni hingga Kota Palembang sejak Senin lalu. Kabid Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah mengatakan, penyusuran tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan tol terkait mudik Lebaran. "Tim ingin melihat kesiapan jalan tol untuk melayani mudik Lebaran mendatang," kata Heriyansyah, Selasa (14/5).

Heriyansyah mengatakan, tim menyusuri JTTS dari Gerbang Tol Natar yang berada tak jauh dari Bandara Radin Inten II Branti menuju Pelabuhan Bakauheni. Kemudian, setelah dari Bakauheni menuju Kota Bandar Lampung melanjutkan perjalanan ke Palembang melalui tol yang sudah tersambung.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo mengatakan, di setiap titik yang dipersiapkan sebagai tempat istirahat dan pelayanan atau *rest area*. Tim memastikan kesiapan penyediaan toilet, air bersih, dan stasiun pengisian bahan bakar umum. "Terbangunnya JTTS mengubah pola transportasi para pemudik. Lonjakan pemudik melalui jalur darat akan terjadi, baik karena ingin mencoba jalan tol baru dan juga karena masih tingginya biaya mudik menggunakan angkutan udara," kata Darmawan, Selasa.

Darmawan menjelaskan, JTTS Lampung menuju Palembang memang memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dari sebelumnya. Jarak dari Lampung menuju Palembang yang dulu ditempuh antara 10 jam hingga 12 jam melalui Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum), kini sudah terpangkas menjadi lima sampai enam jam saja melalui jalur tol.

Kemudian, Darmawan menambahkan, infrastruktur jalan tol baru ini juga harus diantisipasi pihak pelabuhan karena diperkirakan lonjakan pemudik pengguna angkutan laut akan melonjak pada arus mudik tahun ini. "Apalagi diperkirakan pemudik melalui Merak-Bakauheni meningkat hingga 15 persen," kata Darmawan.

Sementara itu, sejumlah bus angkutan Lebaran yang masuk Terminal Induk Rajabasa tengah melakukan pemeriksaan uji kelaikan (*ramp check*) dari petugas berwenang, Selasa (14/5). Bus-bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan bus angkutan kota antarprovinsi (AKAP) menjadi target petugas Dinas Perhubungan melakukan uji kelaikan sebelum H-7 Lebaran.

Kepala Terminal Induk Rajabasa Denny Wijdan mengatakan, sudah lebih dari 40 unit bus yang diperiksa petugas di Terminal Rajabasa. "Setiap bus AKAP dan AKDP yang masuk terminal diperiksa petugas," kata Denny, Selasa. Target pemeriksaan uji kelaikan bus tersebut, lanjut Denny, sebanyak 250 bus AKAP dan AKDP. Pemeriksaan dilakukan petugas Dinas Perhubungan Kota dan Provinsi Lampung. ■ **ed:** nora azizah

Judul	Harga Tanah di Lokasi Calon Ibukota Diawasi	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Republika (Halaman 14)		
Resume	Pergerakan harga tanah di wilayah yang menjadi pilihan ibukota baru ikut menjadi pengawasan antara kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berupaya agar hal terkait tanah tidak menjadi persoalan.		

Harga Tanah di Lokasi Calon Ibu Kota Diawasi

JAKARTA — Pergerakan harga tanah di wilayah yang menjadi pilihan ibu kota baru ikut menjadi pengawasan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berupaya agar hal terkait tanah tidak menjadi persoalan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian ATR Horison Mocodompis menjelaskan, hukum penawaran dan permintaan tanah di daerah yang bakal menjadi calon ibu kota baru dipastikan terjadi, tapi pemerintah siap memperketat pengawasan.

"Sebetulnya, (harga) ini bukan hanya tergantung pada jumlah si pembeli, tapi perilaku penjual juga. Jadi, silakan saja, tapi pemerintah tetap akan bekerja sesuai kaidah yang ada," kata Horison saat dihubungi *Republika*, Selasa (14/5).

Horison mengatakan, sementara ini, pemerintah belum mengumumkan secara spesifik lokasi pemindahan ibu kota dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak spekulasi tanah. Ia menegaskan, tanah yang bakal digunakan merupakan tanah milik negara, sehingga persoalan harga dipastikan tidak menjadi hambatan.

Namun, mengenai pembangunan lainnya yang bakal menjadi pelengkap dari ibu kota belum ditentukan lebih lanjut. Kementerian ATR, kata Horison, sejatinya diberi tugas utama untuk mencari tanah yang memang dimiliki oleh negara.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mesti bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk pengawasan harga. Sebab, pemerintah daerah menjadi pihak yang mengetahui segala transaksi jual beli tanah setempat.

Sementara, Kementerian ATR lebih kepada pendataan tanah yang didaftarkan oleh para pemilik. "Ini akan melibatkan banyak pihak. Pemda juga menjadi pihak yang paling tahu soal itu (harga)," ucap Horison.

Horison mengaku, Kementerian ATR belum terdapat laporan dari Badan Pertanahan Nasional daerah setempat terkait adanya pergerakan kenaikan harga tanah. Pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait agar kebijakan pemindahan ibu kota dapat dilakukan secara kondusif tanpa masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah.

Hasil riset platform jual-beli daring OLX yang dirilis pada awal ini menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota mulai berdampak langsung kepada perilaku masyarakat dalam mencari properti. Meski lokasi pemindahan ibu kota belum ditetapkan, konsumen properti seketika tertuju pada lokasi potensial untuk mempelajari kondisi harga properti setempat.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia, Ignasius Ryan Hasim menyampaikan, pencarian properti di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, naik lima kali lipat. Dari hanya 314 kali pada 25 April 2019 menjadi 1.500 kali pencarian pada 30 April 2019. Tanggal itu tepat satu hari setelah Rapat Terbatas Pemindahan Ibu Kota digelar di Istana Merdeka dan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

"Palangkaraya belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Tapi, trafik pencairan properti tertinggi di Kalimantan ada di Palangkaraya. Sudah ada pergerakan pencarian properti," kata Ignasius.

Ignasius mengatakan, perhatian masyarakat terkait pemindahan ibu kota saat ini mulai mengerucut kepada tiga titik. Yakni, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah, serta kawasan segitiga Palangkaraya, Gunung Mas, dan Katingan di Kalimantan Tengah. ■ dedy darmawan nasution ed: fuji pratiwi

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Kendaraan yang didominasi truk parkir di tempat peristirahatan darurat di Jalan Tol Bakauheni-Bandar Lampung Kilometer 33, Kalianda, Lampung Selatan, Senin malam. Warung tenda yang menjual makanan dan minuman banyak didirikan warga di area ini. Di tempat ini sudah tersedia fasilitas toilet, tempat shalat, dan pengisian bahan bakar portabel yang beroperasi pukul 07.00-19.00.		

Tempat Istirahat Darurat di Jalan Tol



KOMPAS/REHU SRI KUMOHID

Kendaraan yang didominasi truk diparkir di tempat peristirahatan darurat di Jalan Tol Bakauheni-Bandar Lampung Kilometer 33, Kalianda, Lampung Selatan, Senin (13/5/2019) malam. Warung tenda yang menjual makanan dan minuman banyak didirikan warga di area ini. Di tempat ini sudah tersedia fasilitas toilet, tempat shalat, dan pengisian bahan bakar portabel yang beroperasi pukul 07.00-19.00.

Judul	Jalan Alternatif Diperbaiki	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Perbaikan jalan yang akan digunakan untuk jalur alternatif arus mudik lebaran terus dikebut. Sementara itu, kepolisian juga menyiapkan skenario pengaturan dan pengamanan arus mudik.		

Jalan Alternatif Diperbaiki

Perbaikan jalan yang akan digunakan untuk jalur alternatif arus mudik Lebaran terus dikebut. Sementara itu, kepolisian juga menyiapkan skenario pengaturan dan pengamanan arus mudik.

KARAWANG, KOMPAS — Menjelang arus mudik, sejumlah jalan rusak di jalur alternatif mudik di Karawang, Jawa Barat, mulai diperbaiki. Jalur itu ditargetkan rampung diperbaiki dan bisa dilintasi pemudik pada 10 hari menjelang Lebaran atau H-10.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (14/5/2019), sejumlah titik di ruas Jalan Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, menuju jalan pantura Cirebon tengah ditambal dengan aspal. Kerusakan di ruas itu bervariasi, mulai dari jalanan berlubang, bergelombang, hingga aspal mengelupas. Perbaikan pada kedua arah di sepanjang 5 kilometer itu ditargetkan selesai pekan ini.

Menurut Paimin (46), pelaksana lapangan proyek perbaikan Jalan Cikalong-Cilamaya, perbaikan jalan menyesuaikan tingkat kerusakan. Penambalan jalan berlubang, misalnya, dilaku-

kukan dengan menggunakan aspal baru setinggi 10-20 sentimeter.

"Perbaikan dimulai hari ini. Pengerjaan ditargetkan rampung sebelum 24 Mei sehingga pemudik bisa melewati jalan dengan nyaman," katanya.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Karawang Samsuri mengatakan, jalur mudik di wilayahnya ditargetkan siap dilintasi pada H-10 Lebaran. Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan sejumlah pihak mengerjakan perbaikan jalan. Perbaikan di jalur Cikalong-Karasak dilakukan konsorsium Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Cilamaya. Sementara perbaikan di Lamaran-Karasak dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.

Perbaikan jalan juga dilakukan di jalur alternatif menuju Cirebon dan Jawa Tengah. Di

daerah Rawasikut, Kecamatan Telagasari, jalan berlubang di sejumlah titik telah ditambal aspal. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Karawang Bambang Sugiharta menyampaikan, perbaikan dilakukan Kecamatan Telagasari, Kecamatan Lemahabang, dan Kecamatan Cilamaya Kulon.

Di sisi lain, Polres Karawang menyiapkan antisipasi untuk pemudik yang melintasi jalur arteri. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karawang Ajun Komisaris Bariu Buwana mengatakan, tim akan berpatroli di beberapa titik untuk mengurai simpul kemacetan, menutup perputaran arah dari Tanjungpura hingga ke Cikalong, dan menyediakan sejumlah sarana penunjang, seperti papan penunjuk arah.

Penumpang di Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa

Timur memprediksi jumlah penumpang arus mudik dan balik Lebaran menembus 7,2 juta orang. Perjalanan darat masih menjadi pilihan utama.

"Perjalanan darat menjadi pilihan karena jaringan jalan tol sudah ada," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Ada sekitar 3,5 juta pemudik di Jatim yang menempuh perjalanan darat dengan angkutan bus, kereta api, mobil pribadi, dan sepeda motor.

Khofifah mengingatkan agar kelaikan bus umum diperhatikan. "Jangan sampai bus yang tidak layak malah kembali dioperasikan," katanya.

Untuk membantu warga Jatim yang ingin mudik ke kampung halaman, Pemprov Jatim tetap mempertahankan program mudik gratis. Tahun ini kuota untuk 243.000 orang. Jumlah itu naik dibandingkan

dengan tahun lalu sebesar 209.000 orang. Pada 2017, kuota mudik gratis 200.000 orang.

Kebutuhan layanan kesehatan bagi pemudik juga menjadi perhatian Pemprov Jatim. Kepala Dinas Kesehatan Jatim Kohar Heri Santoso menyatakan, ada 1.584 fasilitas kesehatan yang disiagakan untuk mendukung arus mudik Lebaran. Fasilitas kesehatan itu terdiri dari 239 rumah sakit, 924 puskesmas, 243 fasilitas tambahan di pos pengamanan, dan 178 klinik di dalam jaringan jalur mudik.

Ketua Palang Merah Indonesia Jatim Imam Utomo dalam kesempatan terpisah mengatakan, selama masa mudik Lebaran, pihaknya akan menyiapkan sukarelawan kesehatan di 134 tempat istirahat di jalur mudik, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.

(MEL/BRO/VIO)

Judul	Bogor Tata Pulo Geulis Tanpa Menggusur	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Kompas (Halaman 20)		
Resume	Walikota Bogor Bima Arya memastikan penataan kawasan Pulo Geulis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan juga tidak menggusur rumah warga.		

TATA KOTA

Bogor Tata Pulo Geulis Tanpa Menggusur

BOGOR, KOMPAS — Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan penataan kawasan Pulo Geulis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penataan juga tidak menggusur rumah warga.

Penegasan Bima disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan warga dan aktivis LSM di aula serba guna Kantor Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (14/5/2019).

Pulo Geulis adalah delta di Sungai Ciliwung dan masuk Kelurahan Babakan Pasar. Lokasinya di tengah kota. Selain alam yang indah, Pulo Geulis juga memiliki sejarah panjang, termasuk kerukunan masyarakat.

Delta ini dihuni sekitar 2.600 jiwa atau 773 keluarga. Belakangan warga resah karena merbak isu Pemerintah Kota Bogor akan menggusur rumah warga terkait penataan wilayah.

"Saya tak paham kenapa berkembang isu akan ada penggusuran. Awal menjabat wali kota lima tahun lalu, saya menolak meneruskan pembangunan

Terminal Baranangsiang karena saat itu pembangunannya akan menggusur begitu saja masyarakat yang sudah lama di sana.

Jadi, perlu dinetralisasi, tak ada rencana penggusuran rumah warga di Pulo Geulis," katanya.

Pulo Geulis perlu dikembangkan dengan perencanaan yang matang dan harus melibatkan warga setempat, mulai dari perencanaannya. Terkait itu, Bima meminta warga menunjuk perwakilan untuk ikut rapat pembahasan rencana penataan kawasan tersebut.

"Saat ini baru langkah awal untuk melakukan perencanaan. Belum ada desain dan lainnya. Kalaupun nanti ada desain, itu akan dikembalikan ke warga lagi, apakah setuju atau tidak. Menurut rencana, penataan dimulai tahun depan," katanya.

Lima warga yang berbicara dalam pertemuan itu mengatakan resah mendengar rencana penataan karena trauma peristiwa tahun 2010. Pada waktu itu, pemerintah berencana menata kampung mereka dengan membangun rumah susun dan

menggusur rumah warga, khususnya yang berada di bantar sungai.

Apalagi, warga mengetahui belum lama ini ada perjanjian kerja sama terkait rencana penataan Pulo Geulis yang dilakukan Pemkot Bogor dengan sebuah perguruan tinggi swasta dari Jakarta dan sebuah perusahaan swasta. Namun, warga mengaku tidak tahu detail perjanjian itu.

Didi Suryadi, warga, meminta agar Bima memasang pengumuman tertulis yang menyatakan tidak ada penggusuran rumah warga di Pulo Geulis. Ini untuk meyakinkan warga.

Bima meminta Lurah Babakan Pasar Rokib Alhudry dan Camat Bogor Tengah Agustyan-syah memasang pengumuman itu. Ia juga menyilakan warga membuat kontrak politik.

"Silakan bikin kesepakatan kontrak politiknya, nanti saya tanda tangani. Pemerintah membangun untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Bima. (RTS)

Judul	Pemindahan Ibukota Butuh Momen yang Tepat	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 5)		
Resume	Presiden Jokowi memindahkan ibukota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara. Ketua Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan pemindahan ibukota akan mempertegas bahwa Jokowi ialah pemimpin visioner. Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh ke depan sekaligus mampu merealisasikan.		

Ibu Kota Butuh Momen yang Tepat

RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara.

Ketua Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan pemindahan ibu kota akan mempertegas bahwa Jokowi ialah pemimpin visioner. Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh ke depan sekaligus mampu merealisasikannya.

"Ketika orang banyak berpikir 5 sampai 10 tahun, Jokowi jauh ke depan tentang bagaimana masa depan bangsa. Ditambah lagi semua direalisasikan, bahkan mengawal pelaksanaannya. Bukan hanya wacana dan bukan hanya minta laporan," kata Umbas dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, kemarin.

Sayangnya, kata Umbas, gagasan besar Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta sering ditanggapi nyinyir dan utopis oleh berbagai pihak.

Misalnya, itu disebut hanya buntut kekecewaan karena Ahok kalah dalam pilkada di DKI. Kemudian, ada juga yang menganggap itu hanya sebagai pengalihan isu.

"Padahal, tak serendah dan sekecil anggapan mereka itu. Gagasan Pak Jokowi itu untuk kepentingan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia," kata Umbas.

Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Eko Sulistyo menegaskan, pemindahan ibu kota membutuhkan momentum yang tepat. Sudah ada UU yang mengatur kedudukan ibu kota. Seperti UU 29 Tahun 2007 yang mengatur DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Untuk dilegislati nanti, Eko juga menambahkan apakah merevisi UU 29 Tahun 2007 atau malah membuat UU yang baru. Ia menyerahkan pada para pengatur regulasi karena pembahasan legislasi ada di tingkat daerah sampai pusat.

Sementara itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai perlu memikirkan dampak lingkungan di lokasi baru jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. "Misalnya, apakah memindahkan ibu kota juga membuka lahan hutan," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Menurutnya, perlu kajian mendalam dari segi lingkungan dan tidak dibenarkan jika ibu kota baru harus babat alas karena proses itu dinilai tak ramah lingkungan dan mengurangi areal hutan di Tanah Air.

"Karena nanti mungkin ada yang menganggap deforestasi, kritik seperti itu pasti ada," kata Tsamara. (Mal/P-1)

Judul	Perbaikan Jalan Pantura Dikebut	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 21)		
Resume	Perbaikan meliputi penambahan jalan berlubang, pengaspalan ulang, pengecatan media jalan hingga pemotongan rumput dan ilalang. Selain tol, ruas jalan di jalur pantai utara (pantura), Kabupaten Cirebon, juga tengah dibenahi. Perbaikan dikebut hingga pada H-10 Lebaran.		

Perbaikan Jalan Pantura Dikebut

Perbaikan meliputi penambalan jalan berlubang, pengaspalan ulang, pengecatan media jalan hingga pemotongan rumput dan ilalang.

NURUL HIDAYAH
nurul@mediaindonesia.com

SELAIN tol, ruas jalan di jalur pantai utara (pantura), Kabupaten Cirebon, juga tengah dibenahi. Perbaikan dikebut hingga pada H-10 Lebaran.

Berdasarkan pantauan, perbaikan jalan di antaranya sedang dilakukan di wilayah Susukan. Sejumlah pekerja terlihat tengah mengupas aspal yang rusak, selanjutnya akan kembali diaspal menggunakan aspal baru.

Joko, mandor pengerjaan jalan di ruas jalan Susukan, mengungkapkan, perbaikan meliputi pe-

nambalan jalan berlubang, pengaspalan ulang, pengecatan median jalan hingga pemotongan rumput dan ilalang.

"Seluruh perbaikan jalan ditargetkan selesai pada H-10," ungkap Joko. Pada H-10 nanti, sudah tidak ada lagi pengerjaan jalan di ruas mana pun di area pantura Cirebon.

Terpisah, Kapolres Cirebon Ajun Komisaris Besar Suhermanto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan tersebut. "Baik itu tol maupun di jalur arteri," ungkap Suhermanto.

Dia menambahkan, Operasi Ke-

tupat Lebaran 2019 akan digelar Polri pada 29 Mei hingga 10 Juni. Pada saat itu, seluruh perbaikan jalan diharapkan sudah selesai sehingga siap untuk dilalui pemudik.

Sementara itu, jalan tol Pandaan-Malang, kemarin, mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan Presiden Jokowi pada Senin (13/5). Selama masa pembukaan, pemakai jalan tol tidak dipungut biaya hingga Lebaran nanti.

"Sejak dibuka pertama, kondisi arus lalu lintas lancar dan tidak ada kendala," kata Humas Jasa Marga tol Surabaya-Gempol, Agus Tri Antyo, di Surabaya, kemarin.

Tiket kereta api

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta, kemarin merilis data tentang penjualan tiket. Sejak 26 Mei sampai 16 Juni 2019, total tempat duduk yang

terjual untuk keberangkatan dari Daop VI sebesar 48% atau sebanyak 175.155 tempat duduk dari total 366.330 yang tersedia.

Manajer Humas KAI Daop VI, Eko Budiyanto, menjelaskan selama libur Lebaran, KAI Daop VI menjalankan 8 kereta api tambahan, yaitu 1 Argo Lawu, 1 Argo Dwipangga, 2 Taksaka, 2 Lodaya, 1 Sancaka, dan 1 Mataram Premium.

Untuk puncak arus mudik menuju Daop VI, diprediksi terjadi pada 30 Mei, yakni mencapai 31.194 orang. Adapun arus balik dari Daop VI diperkirakan terjadi pada 10 Juni sebanyak 38.700 penumpang.

"Ada peningkatan penumpang sekitar 4%, yaitu dari 643.607 penumpang menjadi 669.416 penumpang," kata Eko. Dia berharap, masyarakat bisa segera membeli tiket untuk mudik Lebaran.

Di lain hal, akibat mahalanya

harga tiket pesawat membuat penumpang beralih menggunakan angkutan laut. Peningkatannya diperkirakan hingga 100%.

Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, mengatakan sangat banyak penumpang yang beralih dari menggunakan transportasi udara ke kapal laut. "Lonjakan penumpang kapal laut sudah terasa. Bukan 60% lagi, tapi sudah 100%," kata Erzaldi, kemarin.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, dia menegaskan pihaknya sudah meminta ASDP agar menambah armada kapal ro-ro, baik itu di Tanjung Kalian Muntok, Pangkalbalam, Sadar maupun Belitung.

Di Bali, Pemkab Tabanan melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar mudik gratis. Mereka telah menyiapkan 11 bus bagi warga yang akan pulang ke kampung halaman mereka. (FL/RS/N-3)

Judul	Rencana Pindah Ibukota: Pusat Perlu Terapkan Konsep Urban Forest	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 8)		
Resume	The Natural Conservacy menilai jika pemerintah serius ingin memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan, maka perlu ada konsep pembangunan hijau. Pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup dari The Nature Conservacy (TNC) Kalimantan Timur, Niel Makinuddin menyatakan, pihaknya belum mendengar rancangan ibukota baru dari pemerintah pusat.		

► **RENCANA PINDAH IBU KOTA**

Pusat Perlu Terapkan Konsep *Urban Forest*

Bisnis, SAMARINDA — The Natural Conservacy menilai jika pemerintah serius ingin memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan, maka perlu ada konsep pembangunan hijau.

Gloria FK Lawi & Yodie Hardiyanto
redaksi@bisnis.com

Pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup dari The Nature Conservacy (TNC) Kalimantan Timur, Niel Makinuddin menyatakan, pihaknya belum mendengar rancangan ibu kota baru dari pemerintah pusat.

Dia pun mengusulkan agar pembangunan bisa berbasis *urban forest* atau kota hijau, tanpa memabat banyak pohon dari hutan.

"Kami usulkan *urban forest* di Kaltim. Tidak sama dengan New York yang saat ini baru menanam tanaman di atas gedung. Kita sebaiknya dari awal rancangan sudah hijau. Ini belum saya dengar arah ibu kota seperti apa," jelas Niel di kantor Dinas Penajam Paser Utara (PPU). Selain dekat bandara juga dekat dengan pelabuhan. Selain itu masih bisa seiring dengan pembangunan *urban forest* yakni 40% porsi hutan dalam kota.

Niel menambahkan, salah satu fokus adalah wacana lokasi ibu kota di Tahura Bukit Soeharto. Menurut Niel, fungsi hidrologi Bukit Soeharto sebagai resapan air di Kutai Kertanegara, Samarinda, dan Balikpapan perlu jadi pertimbangan matang sebelum pemindahan.

Lokasi ini juga termasuk tujuh daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara pada tiga tempat, yakni Sungai Mahakam dan Sungai Loa Haur, DAS yang bermuara di Selat Makassar adalah Sungai Seluang, Tiram, Bangsal, Serayu, dan Salok Cempedak. Ketiga, adalah DAS yang bermuara di Teluk Balikpapan adalah Sungai Semoi.

"Jangan ditetapkan dulu di Bukit Soeharto kalau belum ada kajian. Identifikasi dahulu," paparnya.

Niel menyatakan bahwa perubahan fungsi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto jadi ibu kota akan memberi dampak pada terumbu karang di Selat Makassar. Padahal, kawasan itu termasuk dalam Segitiga Karang Dunia yang kaya dengan keindahan terumbu karang.

Oleh karena itu, Niel mengusulkan akan lebih baik jika Tahura Bukit Soeharto direvitalisasi sebagai hutan wisata ketimbang menjadi ibu kota. Dengan demikian tetap bisa menguntungkan dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

► **Jakarta sebagai kota bisnis diharapkan mampu berkembang dan bersaing secara regional dengan kota-kota lain, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, atau Manila.**

Dia juga menambahkan, jika pemerintah pusat bersikeras membangun ibu kota di Tahura Bukit Soeharto, maka fungsi DAS akan dibuat yang baru. Namun kondisi itu tidak memberi jaminan pada kualitas dan kapasitas air yang dihasilkan.

Menurut Niel, lokasi lain yang layak dipertimbangkan adalah Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Selain dekat bandara juga dekat dengan pelabuhan. Selain itu masih bisa seiring dengan pembangunan *urban forest* yakni 40% porsi hutan dalam kota.

Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, penunjukkan Tahura Bukit Soeharto sebagai bakal ibu kota negara sebenarnya tidak memiliki banyak kendala ekologis, ataupun merusak hutan.

"Ini tak masalah bisa tukar guling. Tanah yang dipakai hutan diganti tempat lain yang penting kita sekian persen yang hutan terjaga," terang Hadi.

MAMPU BERSAING

Setelah pusat pemerintahan atau ibu kota pindah dari Jakarta ke luar Jawa, Jakarta sebagai kota bisnis diharapkan mampu berkembang dan bersaing secara regional dengan kota-kota lain, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, atau Manila.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi mengenai rencana pemindahan pusat pemerintahan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5). Setelah ibu kota nanti pindah ke luar Jawa, Bambang menekankan bahwa Jakarta tetap akan berkembang sebagai kota bisnis utama di Indonesia.

"Bahkan kita inginnya Jakarta tidak

hanya jago kandang, jangan hanya terbesar di Indonesia, tetapi harus bisa bersaing, kalau dengan Singapura berat, ya paling tidak dengan Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila," kata Bambang.

Bambang menekankan, kualitas Jakarta sebagai kota bisnis jangan sampai kalah dari Kuala Lumpur, Bangkok, atau Manila. Di samping itu, menurutnya, Indonesia akan masuk ke dalam peringkat lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

Apabila sudah masuk ke dalam peringkat tersebut, Jakarta sebagai kota bisnis utama di Indonesia harus punya ukuran dan kapasitas yang lebih besar daripada saat ini.

Ibu kota baru yang akan dibangun oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong perekonomian Kalimantan yang masih sangat bergantung terhadap sumber daya alam pada saat ini.

"Karena Kalimantan salah satu pulau yang kegiatan ekonominya sekarang sangat terpengaruh rendahnya [harga] komoditas dan oleh ketegantungan terhadap sumber daya alam. Kami ingin upaya membangkitkan ekonomi Kalimantan sebagai salah satu kandidat kuat ibukota baru," kata Bambang.

Pemindahan ibu kota, menurut Bambang, adalah salah satu strategi pemerataan ekonomi agar tidak terpusat di Jawa. Pemerintah berusaha menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Jawa.

"Pasti akan ada dampak pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar ibukota baru dan terutama untuk wilayah itu sendiri," kata mantan Menteri Keuangan ini.

Bambang Brodjonegoro menyatakan aktivitas pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2024 setelah berbagai tahapan diselesaikan.

"Paling tidak, 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian, dari Jakarta ke wilayah ibu kota baru tersebut," kata Bambang. Sebelum aktivitas pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan itu dimulai, Bambang memperkirakan dalam periode 2022—2024, konstruksi pembangunan infrastruktur, perumahan dan fasilitas komersial sudah dilakukan.

Dalam periode 2021—2022, pemerintah akan menyiapkan lahan dan membangun infrastruktur dasar. Kawasan perkotaan, menurut Bambang, membutuhkan lahan sekitar 40.000 hektare dan kawasan kantor pemerintahan membutuhkan 2.000 hektare. ■

Judul	Harga Baru Rumah Subsidi: Penetapan Tunggu Persetujuan Menkeu	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Rencana pemerintah meningkatkan batas harga rumah bersubsidi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan meskipun sebelumnya harga baru rumah bersubsidi ditargetkan berlaku mulai bulan lalu.		

► HARGA BARU RUMAH SUBSIDI

Penetapan Tunggu Persetujuan Menkeu

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah meningkatkan batas harga rumah bersubsidi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan meskipun sebelumnya harga baru rumah bersubsidi ditargetkan berlaku mulai bulan lalu.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini posisi pengajuan kenaikan batas harga rumah masih berada di tangan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

“Posisi RPMK [Rancangan Peraturan Menteri Keuangan] masih menunggu proses penetapan oleh Kemenkeu. Jadi, belum banyak yang bisa diinfokan,” ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (13/5).

Adang juga menyebutkan bahwa untuk waktu pemberlakuannya, Kementerian PUPR juga berharap agar bisa secepatnya. Adapun, proses dan kemajuan di tangan Kemenkeu juga terus dikawal oleh Kementerian PUPR.

“Kalau sudah di sekjen harusnya bisa segera terbit ya, tapi ini jadwalnya jadi di luar jangkauan kami,” sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk meningkatkan harga rumah subsidi sekitar 3,50%—7,50%. Kenaikan

tersebut dirasa perlu agar pengembang bisa lebih bersemangat dalam melakukan pembangunan.

Kenaikan tersebut sudah dihitung agar tidak memberatkan calon pembeli rumah, terutama dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, kenaikan batas harga tersebut akan ditetapkan pada April 2019, setidaknya setelah pemilihan umum dilaksanakan. Namun, hingga kini Kementerian PUPR pun masih belum memiliki gambaran terkait dengan kapan aturan tersebut diberlakukan.

Associate Director PT Ciputra Residence Yance Onggo mengatakan bahwa pihaknya sangat menantikan dimulainya pemberlakuan batas harga baru untuk rumah subsidi.

“Kenaikan batas harga untuk rumah subsidi itu kan artinya cakupan pasar kami bisa lebih luas, bisa lebih banyak orang dengan penghasilan lebih tinggi dari yang sekarang juga bisa akhirnya beli rumah subsidi juga,” katanya.

Hal itu bisa menguntungkan pengembang. Pasalnya, pengembang jadi bisa memberi lebih banyak pilihan bagi calon pembeli dan nantinya juga dapat membantu pemerintah memenuhi target Program Sejuta Rumah, serta mengisi kebutuhan kekurangan pasokan hunian. *(Mutia Nabila)*

Judul	Pengembang Minta Sejumlah Insentif	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pengembang properti akan mendukung pembangunan calon ibukota baru Indonesia apabila diberikan beragam insentif, seperti kemudahan dalam perizinan serta kepastian terkait dengan permintaan pasar.		

► PEMINDAHAN IBU KOTA

Pengembang Minta Sejumlah Insentif

Bisnis, JAKARTA — Pengembang properti akan mendukung pembangunan calon ibu kota baru Indonesia apabila diberikan beragam insentif, seperti kemudahan dalam perizinan serta kepastian terkait dengan permintaan pasar.

Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang, Kawasan, dan Properti Ramah Lingkungan DPP Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan bahwa swasta memerlukan insentif dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

“Swasta dapat diajak apabila secara komersial menguntungkan. Namun, tawarkan dulu apa keuntungan yang dapat diberikan kepada swasta?” tuturnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Sementara itu, Assistant Vice President Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk., Alvin Andronicus mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung rencana pemindahan ibu kota setelah ada perencanaan jelas terkait dengan pengembangan infrastruktur di kawasan baru itu.

Setelah itu, pihaknya juga mengharapkan pembangunan ibu kota baru harus mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal dan menetap di kawasan itu sehingga permintaan terhadap produk hunian juga tinggi. Pengembang, katanya, juga membutuhkan insentif seperti kemudahan perizinan dalam pembangunan proyek komersial.

“Kami akan mendukung, tetapi saat ini proses dan biaya perizinan terlalu *ribet*,” ujarnya.

Direktur Ciputra Grup Harun Hajadi mengatakan bahwa pembangunan properti tidak dapat dipaksakan apabila permintaan belum memadai sehingga pemerintah harus bisa menciptakan permintaan di ibu kota baru.

Salah satu potensi pasar yang dapat digarap, ujarnya, adalah permintaan dari aparat sipil negara. Apabila permintaan dari segmen ini tinggi, pengembang pun akan menjajaki proyek hotel, selain residensial dan komersial.

“Pasar properti tidak bisa dipaksakan. *Pertama*, harus ada *demand* dulu. Baru kemudian pasar properti akan terbangun,” imbuhnya.

BERBAGAI TAHAPAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa aktivitas pemindahan Ibu Kota akan dimulai pada 2024 setelah berbagai tahapan diselesaikan.

Sebelum aktivitas pemindahan Ibu Kota atau pusat pemerintahan itu dimulai, Bambang memperkirakan dalam periode 2022—2024, konstruksi pembangunan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas komersial sudah dilakukan. Pada 2021—2022, pemerintah akan menyiapkan lahan dan membangun infrastruktur dasar.

Kawasan perkotaan, menurut Bambang, memerlukan lahan 40.000 hektare dan kawasan kantor pemerintahan 2.000 hektare.

Terkait dengan keterlibatan swasta dalam proyek ini, Bambang menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi ruang untuk skema konsesi kepada BUMN dan swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota. “Selain yang *full private* adalah melalui KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha]. Itu juga insentif karena swasta bisa dapat kepastian *return* dari proyek yang dikerjasamakan,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan riset OLX 2019, pencarian properti di Palangkaraya naik hingga lima kali lipat sejak Presiden mengumumkan wacana pemindahan Ibu Kota.

Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasim mengatakan bahwa wacana tentang pemindahan ibu kota mendorong masyarakat mencari properti atau hunian di Palangkaraya sebagai kota yang memiliki potensi yang paling kuat sebagai calon ibu kota negara.

“Pencarian properti di Palangkaraya mengalami kenaikan lima kali lipat semenjak Presiden mengumumkan dan menindak serius pemindahan Ibu Kota,” ujarnya, Senin, (13/5).

Ryan mengatakan bahwa kata kunci terbanyak yang sering digunakan para calon pembeli rumah dalam melakukan pencarian rumah melalui OLX yakni kata kunci ‘rumah murah’.

Menurutnya, sebanyak 610.000 pengguna OLX paling banyak melihat iklan rumah dengan harga sekitar Rp200 juta hingga Rp400 juta. (*Yodie Hardiyani/Putri Z. Salsabila*)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 15 Mei 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pengendara sepeda motor melintasi jalur Trans—Sulawesi poros Palu—Toboli di kawasan Pegunungan Kebun Kopi, Sulawesi Tengah, Selasa (14/5). Jalur penghubung Kota Palu dengan sejumlah kabupaten serta Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara tersebut merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui para pemudik saat Lebaran 2019.		

► JALUR MUDIK TRANS-SULAWESI



Antara/Mohamad Hamzah

Pengendara sepeda motor melintasi jalur Trans—Sulawesi poros Palu—Toboli di kawasan Pegunungan Kebun Kopi, Sulawesi Tengah, Selasa (14/5). Jalur penghubung Kota Palu dengan sejumlah

kabupaten serta Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara tersebut merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui para pemudik saat Lebaran 2019.